

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nurnila Sari¹, Fahrudin Zain Olilingo², Ivan Rahmat Santoso³, Herwin Mopangga⁴, Fitri Hadi Yulia Akib⁵

Universitas Negeri Gorontalo¹²³⁴⁵

e-mail: sarinurnila5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari beberapa komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD sah lainnya terhadap total PAD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan menerapkan pendekatan kuantitatif melalui regresi linear berganda, dilengkapi dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Temuan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, keempat variabel tersebut memberikan dampak signifikan terhadap PAD sebesar 99%. Secara individu, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbukti berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan potensi besar sebagai sumber pendapatan yang stabil. Sementara itu, retribusi daerah dan komponen PAD sah lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, bahkan yang terakhir bersifat negatif, menandakan kontribusi yang masih terbatas. Hasil ini menyoroti perlunya optimalisasi dalam sistem pemungutan pajak dan pengelolaan aset daerah demi meningkatkan PAD secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of several key components of Local Own-Source Revenue (PAD), namely local taxes, local levies, results of separated regional wealth management, and other legitimate PAD sources, on the total PAD in Southeast Sulawesi Province. The research utilizes secondary data from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik) and employs a quantitative approach through multiple linear regression, supplemented by classical assumption tests and hypothesis testing. The findings indicate that, overall, these four variables significantly impact PAD, contributing 99% to its total. Individually, local taxes and the results of separated regional wealth management are found to have a positive and significant influence, demonstrating their substantial potential as stable revenue sources. Conversely, local levies and other legitimate PAD components show an insignificant influence—with the latter even exhibiting a negative effect—signaling their limited contribution thus far. These results highlight the need for optimization in tax collection systems and management of regional assets to sustainably increase PAD, thereby supporting development and community welfare in Southeast Sulawesi.

Keywords: *Regional Tax, Regional Retribution, Results of Regional Asset Management, Other Regional Original Income, Regional Original Income.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik, mengelola sumber daya secara efisien, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan yang mandiri dan efektif, perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa

pembiayaan pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Comission, 2016).

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta mendorong inovasi dan kompetisi sehat antarwilayah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara optimal guna mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan daya dorong pembangunan yang dimiliki suatu daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, PAD tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan (Novita Wulandari et al., 2021).

PAD bersumber dari empat komponen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Komponen ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi keuangan secara optimal sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi fiskal (Comission, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut jenis-jenis pajak tertentu secara mandiri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme transfer dana, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang tetap menjadikan PAD sebagai salah satu fondasi utama kemandirian fiskal daerah.

Peningkatan PAD sangat penting karena turut menentukan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan dasar dan melakukan investasi pembangunan. Menurut Monoarfa et al. (2022), pendapatan asli daerah tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan daerah dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih siap membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategisnya, provinsi ini memiliki peluang yang sangat besar dalam mendongkrak pendapatan melalui optimalisasi potensi yang ada. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kurang maksimalnya pengelolaan aset, terbatasnya inovasi kebijakan, serta tantangan regulasi dalam peningkatan kapasitas fiskal. Upaya peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mempercepat pembangunan yang merata di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai PAD dan otonomi daerah, studi yang secara khusus menganalisis efektivitas kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih terbatas. Belum banyak penelitian yang secara empiris memetakan kendala-kendala aktual yang dihadapi daerah ini dalam optimalisasi PAD, khususnya dalam konteks pasca-implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009 dan dinamika desentralisasi fiskal yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori yang bertujuan mengkaji hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel bebas, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara yang mencakup kurun waktu 2014–2023. Untuk menganalisis data, digunakan regresi linier berganda guna melihat pengaruh secara parsial maupun simultan dari variabel-variabel bebas terhadap PAD. Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model. Pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak EViews 12 dan Microsoft Excel, yang membantu dalam interpretasi hasil. Model matematis yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon,$$

di mana α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi masing-masing variabel bebas, dan ε adalah nilai error. Model ini digunakan untuk menilai kontribusi masing-masing komponen terhadap fluktuasi PAD di Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh empat komponen utama PAD terhadap keseluruhan PAD Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2014 hingga 2023. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik untuk menguji validitas model.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas melalui metode Jarque-Bera menunjukkan p-value sebesar 0,57 ($>0,05$), menandakan residual berdistribusi normal. Tidak ditemukan multikolinearitas karena semua VIF <10 dan tolerance $>0,1$. Uji Glejser menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,27 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Keseluruhan hasil menunjukkan model memenuhi semua syarat untuk dilakukan analisis regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sebaliknya, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini berarti kontribusi PAD lebih dominan berasal dari pajak dan pengelolaan aset.

Uji t

Pajak Daerah ($p = 0,0019$) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ($p = 0,0278$) berpengaruh signifikan secara parsial. Retribusi Daerah ($p = 0,3093$) dan Lain-lain PAD yang Sah ($p = 0,4803$) tidak signifikan.

Uji F menunjukkan $F\text{-hitung} = 332,55 > F\text{-tabel} = 5,19$, dengan signifikansi 0,00, menandakan bahwa keempat variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,996 mengindikasikan bahwa 99,6% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan PAD. Hasil ini sejalan dengan teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam struktur PAD. Pajak daerah mencerminkan kontribusi masyarakat dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar pula PAD yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Permatasari; M., Subekti; A., (2023) yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Novita Wulandari, Buyung Sarita, Wahyuniati Hamid, (2021) dan Haekal & Widajantie (2022), yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan penerimaan retribusi daerah belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang diperoleh dari pembayaran atas jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Meskipun secara teori keuangan daerah, retribusi memiliki potensi sebagai sumber pendapatan yang penting, namun dalam praktiknya kontribusi dari sektor ini dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya efektivitas pemungutan, kualitas layanan yang belum optimal, serta keterbatasan cakupan jenis layanan yang dapat dikenakan retribusi. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang juga menemukan hasil serupa. Misalnya, penelitian oleh Sudarmana & Sudiarta, (2021) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di beberapa kabupaten di Indonesia karena realisasi penerimaannya cenderung rendah dan tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor retribusi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi dan optimalisasi sistem pengelolaan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah perlu memperluas basis objek retribusi, meningkatkan kualitas layanan publik yang dikenakan retribusi, memperbaiki sistem pemungutan agar lebih efisien dan transparan, serta melakukan sosialisasi tarif yang proporsional sehingga masyarakat terdorong untuk membayar secara sukarela dan tertib.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari penyertaan modal pemerintah daerah, terutama melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD atau entitas lain yang dimiliki daerah. Menurut teori keuangan daerah, sumber pendapatan ini berperan penting sebagai bentuk pemanfaatan aset daerah secara produktif. Signifikansi pengaruh variabel ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan kinerja entitas yang menerima penyertaan modal telah memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah (Jurnal Moneter, 2016; Saleh, 2020). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh, (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara signifikan berkontribusi terhadap PAD di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu, Putra & Hidayat, (2016) juga menemukan bahwa optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan kekayaan daerah dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Setiaji, Zaman, & Linawati (2023) juga menegaskan efektivitas dan kontribusi positif hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD. Dengan demikian, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu terus mendorong perbaikan tata kelola BUMD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dipisahkan serta memastikan bahwa penyertaan modal dilakukan berdasarkan analisis kelayakan yang matang. Langkah ini penting untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PAD di masa yang akan datang.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari sumber pendapatan ini terhadap PAD belum optimal. Lain-Lain PAD yang Sah mencakup sumber-sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut teori keuangan daerah, sumber pendapatan ini seharusnya dapat menjadi tambahan yang signifikan bagi PAD. Namun, ketidaksignifikan pengaruhnya dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, manajemen yang kurang efektif, atau kurangnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan lain yang sah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafandi & Romandhon, (2020), yang menemukan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Hariyanti, (2021) juga menunjukkan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi sumber pendapatan lain yang sah serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaannya.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara simultan menunjukkan keempat komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengelolaan efektif dari sumber-sumber pendapatan tersebut. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam memobilisasi potensi ekonomi lokal serta memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Penelitian oleh Mulyani & Ramdini (2021) menemukan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi signifikan terhadap PAD di Kabupaten Majalengka. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, seperti keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga memberikan kontribusi penting terhadap PAD. Penelitian oleh Hafandi & Romandhon, (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah yang efektif dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Jayapura. Komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang mencakup sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pendapatan bunga, denda, atau hibah, menambah fleksibilitas dan diversifikasi pendapatan daerah. Studi oleh Afiyah & Masyitah, (2023) menekankan bahwa diversifikasi sumber pendapatan ini berperan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Fineteach (2022) juga menguatkan bahwa efektivitas keempat komponen ini secara keseluruhan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara keseluruhan, pengelolaan yang sinergis dan efektif dari keempat komponen ini sangat penting untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, mengoptimalkan kinerja BUMD, serta mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain yang potensial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa pajak daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti peningkatan penerimaan dari sektor ini secara langsung mendukung kapasitas keuangan daerah. Sementara itu, retribusi daerah meskipun berpengaruh positif, tidak menunjukkan signifikansi statistik, mengindikasikan bahwa sektor ini masih belum memberikan dampak yang berarti dan perlu ditingkatkan efektivitas pengelolaannya. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD, memperlihatkan bahwa optimalisasi aset daerah, terutama melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat menjadi sumber penerimaan penting. Di sisi lain, komponen lain-lain PAD yang sah justru menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan, yang menandakan masih kurangnya kontribusi dari sumber-sumber alternatif ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam mengidentifikasi potensi baru dan memperbaiki sistem pengelolaan yang ada guna memperkuat struktur pendapatan daerah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, J., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kab. Deli Serdang. *Journal on Education*, 6(1), 9680–9691. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi/article/view/1613>
- Comission, E. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sragen tahun 1991–2013. *Jurnal Moneter*, 4(1), 1–23.
- Haekal, Y., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*
- Copyright (c) 2025 KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

- (MEA), 6(1). <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1887>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hariyanti, F. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Skripsi tidak dipublikasikan).
- Jurnal Fineteach. (2022). Analisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Fineteach*, 2(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/viewFile/48134/19561>
- Jurnal Moneter. (2016). Pengaruh retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Moneter*, 4(2). <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/download/3498/2691>
- Monoarfa, M., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Analysis of the effect of entertainment tax, hotel tax, and restaurant tax on regional original income (PAD) in Gorontalo City 2014–2018. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(1), 84–87.
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka periode 2017–2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172.
- Permatasari, M., & Subekti, A. R. M. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2019). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>
- Saleh, R. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Setiaji, B., Zaman, B., & Linawati. (2023). Efektivitas dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/383108747>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2021). Pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Wulandari, N., Sarita, B., & Hamid, W. Z. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Organisasi*, 5(2), 194–208.